

Pola Interaksi Kolaboratif Pemerintah Daerah Dengan Komunitas Wirausaha Muda Sebagai Upaya Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bandung Barat

Letizia Dyastari¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received September 1, 2026 Revised September 1, 2026 Accepted September 1, 2026	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola interaksi kolaboratif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan komunitas wirausaha muda dalam upaya penguatan ekosistem ekonomi kreatif, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kolaborasi, serta menganalisis dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan lima informan yang terdiri atas perwakilan dinas terkait, ketua dan anggota komunitas wirausaha muda, serta akademisi pendamping program, melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berlangsung melalui tiga jalur, yaitu kelembagaan formal, pendampingan partisipatif, dan komunikasi digital, yang membentuk pola interaksi multiarah antara pemerintah dan komunitas. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepemimpinan daerah dan ketersediaan infrastruktur digital, sementara faktor penghambat mencakup birokrasi yang kompleks, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan akses pembiayaan dan sertifikasi. Kolaborasi ini terbukti berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas individu, penguatan identitas kolektif, dan perluasan jejaring pemasaran, meskipun manfaatnya belum merata di seluruh wilayah kabupaten. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan birokrasi, perluasan jangkauan program, serta penguatan regenerasi kepemimpinan komunitas guna mendukung keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kolaborasi pemerintah dan komunitas wirausaha muda di masa mendatang.
Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Kolaborasi, Komunitas Wirausaha Muda, Pemerintah Daerah	
Keywords: <i>Collaboration, Creative Economy, Local Government, Young Entrepreneurship Community</i>	
	ABSTRACT <i>This study aims to analyze the pattern of collaborative interaction between the Regional Government of West Bandung Regency and young entrepreneurship communities in strengthening the creative economy ecosystem, to identify supporting and inhibiting factors of the collaboration, and to analyze its impact on the sustainability of the ecosystem. This research employed a qualitative approach with a case study design, involving five informants consisting of representatives from relevant government agencies, the chairperson and member of the young entrepreneurship community, and an academic program facilitator, through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The findings reveal that collaboration occurs through three pathways, namely formal institutional channels, participatory mentoring programs, and digital communication, which together form a multidirectional interaction pattern between the government and the community. The main supporting factors include consistent regional leadership commitment and the availability of digital infrastructure, while the inhibiting factors include complex bureaucracy, low digital literacy, and limited access to financing and certification.</i>

This collaboration has proven to positively affect individual capacity building, collective identity strengthening, and marketing network expansion, although its benefits have not been evenly distributed across the regency. This study recommends simplifying bureaucratic procedures, expanding program outreach, and strengthening community leadership regeneration to support the sustainability of a creative economy ecosystem built on collaboration between local government and young entrepreneurship communities.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Letizia Dyastari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Kalimantan Timur, Indonesia
Email: letiziadyastari@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pemberdayaan generasi muda sebagai pelaku utama inovasi dan produktivitas lokal. Kabupaten Bandung Barat, sebagai wilayah dengan potensi kreativitas anak muda yang terus berkembang, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kontribusi creative economy terhadap perekonomian daerah akibat belum terintegrasinya peran pemerintah daerah dengan komunitas wirausaha muda secara sistematis. Wirausaha muda kerap menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan akses pembiayaan, minimnya networking lintas sektor, serta lemahnya dukungan kebijakan yang bersifat bottom-up. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan ekosistem ekonomi kreatif tidak dapat mengandalkan inisiatif individu semata, melainkan memerlukan pola interaksi kolaboratif yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan lain secara berkelanjutan [1]. Kajian mengenai kemitraan pemerintah dan sektor kreatif telah banyak dibahas dalam literatur terdahulu.

Rahmawati dkk. [2] menekankan bahwa kemitraan antara pemerintah dan swasta menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, karena masing-masing pihak membawa sumber daya yang saling melengkapi, mulai dari regulasi, pembiayaan, hingga akses pasar. Sejalan dengan hal tersebut, Handini dkk. [3] menegaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sangat ditentukan oleh kualitas inovasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam menjembatani kebutuhan pelaku usaha muda dengan program-program strategis daerah. Di sisi lain, Ardhiyansyah dkk. [4] menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif lintas sektor terbukti efektif dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi di wilayah Jawa Barat, sebuah temuan yang relevan secara geografis dengan konteks Kabupaten Bandung Barat. Nur [5] turut memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa strategi kolaboratif antara masyarakat dan UMKM mampu mempercepat penguatan ekonomi berbasis komunitas di tingkat desa maupun kabupaten.

Sementara itu, Nguru & Killa [6] menemukan bahwa pola kemitraan antarwirausaha, baik lokal maupun lintas latar belakang, dapat meningkatkan kinerja usaha melalui pertukaran pengetahuan dan perluasan jejaring pasar. Stawicka [7] juga membuktikan secara empiris bahwa inovasi yang lahir dari sinergi berbagai aktor berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah. Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kolaborasi pemerintah dengan pelaku ekonomi kreatif secara umum, masih terdapat kesenjangan (research gap) yang signifikan, yaitu minimnya kajian yang secara spesifik menelaah pola interaksi kolaboratif antara pemerintah daerah dengan komunitas wirausaha muda sebagai entitas kolektif, bukan sekadar pelaku usaha individual,

dalam konteks penguatan ekosistem ekonomi kreatif di tingkat kabupaten. Sebagian besar literatur terdahulu cenderung berfokus pada kemitraan pemerintah-swasta secara makro atau pemberdayaan UMKM secara umum, tanpa menyoroti dinamika interaksi kelembagaan komunitas pemuda sebagai simpul jaringan (network node) dalam ekosistem kreatif lokal.

Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada upaya mengungkap pola, mekanisme, serta bentuk interaksi kolaboratif yang berlangsung antara pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan komunitas wirausaha muda, sekaligus menganalisis bagaimana pola tersebut berkontribusi terhadap penguatan ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana pola interaksi kolaboratif yang terbentuk antara pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan komunitas wirausaha muda dalam upaya penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat efektivitas kolaborasi tersebut dalam praktiknya di lapangan. Ketiga, sejauh mana kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas wirausaha muda berdampak terhadap penguatan daya saing dan keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tiga hal. Pertama, mendeskripsikan dan menganalisis pola interaksi kolaboratif antara pemerintah daerah dengan komunitas wirausaha muda di Kabupaten Bandung Barat. Kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut. Ketiga, menganalisis dampak kolaborasi terhadap penguatan ekosistem ekonomi kreatif di daerah tersebut secara komprehensif. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperkaya body of knowledge mengenai model tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas muda, sekaligus mengisi kesenjangan literatur yang selama ini masih terbatas pada kemitraan pemerintah-swasta secara umum. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif terhadap kebutuhan komunitas wirausaha muda, serta memberikan referensi bagi komunitas kreatif dalam membangun pola kemitraan yang lebih strategis dengan pemangku kepentingan pemerintahan guna mempercepat pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Collaborative governance atau tata kelola kolaboratif merupakan kerangka konseptual yang menekankan proses pengambilan keputusan bersama antara pemerintah dan aktor non-pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik yang bersifat kompleks dan tidak dapat ditangani secara sepihak. Model ini menekankan adanya kesetaraan peran antaraktor, proses dialog yang berkelanjutan, serta orientasi pada pemahaman bersama sebagai landasan pengambilan keputusan kolektif. Studi yang dilakukan di Kota Bandung menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif dalam program pemerintah daerah dapat berjalan efektif apabila didukung oleh koordinasi lintas aktor dan kejelasan pembagian peran antara pemerintah dengan elemen masyarakat [8]. Sejalan dengan itu, penelitian pada sektor pariwisata daerah turut membuktikan bahwa model kolaboratif mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sinergi program antara pemerintah dan komunitas [9].

Keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas tidak terlepas dari kapasitas inovasi sektor publik dalam merumuskan kebijakan yang adaptif. Namun demikian, implementasi inovasi kebijakan publik di tingkat daerah kerap dihadapkan pada faktor penghambat seperti resistensi birokrasi, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan [10]. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pola interaksi kolaboratif sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah daerah untuk membuka ruang partisipasi bagi komunitas, termasuk komunitas wirausaha muda, dalam siklus kebijakan pembangunan ekonomi lokal.

Ekonomi kreatif dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu sebagai sumber utama penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja.

Ekosistemnya terbentuk dari interaksi berbagai aktor, meliputi pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha sebagai penggerak produksi, akademisi sebagai penyedia riset, serta komunitas sebagai wadah kolaborasi dan inkubasi ide, yang secara bersama-sama membentuk creative ecosystem yang saling bergantung satu sama lain [11]. Ekosistem yang sehat ditandai oleh keterhubungan antarpilar tersebut, di mana lemahnya salah satu pilar dapat menghambat pertumbuhan keseluruhan sistem.

Generasi muda memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi kreatif karena karakteristiknya yang adaptif terhadap teknologi, terbuka terhadap ide baru, dan memiliki keberanian mengambil risiko usaha. Kajian mengenai peluang pengembangan ekonomi kreatif di era society 5.0 menunjukkan bahwa generasi milenial dan generasi muda berperan signifikan dalam mendorong transformasi digital sektor kreatif, namun potensi tersebut baru dapat teraktualisasi secara optimal apabila didukung oleh ekosistem kebijakan yang inklusif dan berpihak pada komunitas wirausaha muda [12]. Dengan demikian, penguatan pola interaksi kolaboratif antara pemerintah daerah dan komunitas wirausaha muda menjadi variabel penting yang menjembatani potensi individu generasi muda dengan dukungan struktural dari pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pola interaksi kolaboratif antara pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan komunitas wirausaha muda dalam penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, konteks, serta dinamika sosial di balik suatu fenomena secara natural dan tidak terstruktur secara kaku, sebagaimana ditegaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam menggali data secara alamiah dari lapangan [13]. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dengan fokus pada instansi pemerintah daerah yang menaungi urusan ekonomi kreatif dan kepemudaan, serta komunitas wirausaha muda yang aktif dalam kegiatan kreatif setempat. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan kebutuhan data serta pengalaman langsung informan dalam proses kolaborasi yang diteliti. Penelitian ini melibatkan lima orang informan, terdiri atas: R.S. selaku perwakilan Dinas Koperasi, UKM, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Barat; N.P. selaku staf Dinas Pemuda dan Olahraga yang menangani program kewirausahaan pemuda; A.F. selaku ketua komunitas wirausaha muda; M.D. selaku anggota aktif komunitas sekaligus pelaku usaha kreatif; dan Y.K. selaku akademisi yang berperan sebagai pendamping program kewirausahaan di wilayah tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif terhadap kegiatan kolaborasi yang berlangsung, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan program, dan arsip kegiatan terkait. Ketiga teknik ini digunakan secara simultan untuk memperoleh triangulasi data yang saling melengkapi dan memperkuat keabsahan temuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif, sehingga pola-pola interaksi kolaboratif dapat diidentifikasi secara sistematis dari data mentah yang diperoleh di lapangan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, guna memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lokasi penelitian, bukan sekadar opini subjektif peneliti semata [14].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pola Interaksi Kolaboratif Pemerintah Daerah dengan Komunitas Wirausaha Muda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola interaksi kolaboratif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan komunitas wirausaha muda berlangsung melalui tiga jalur utama, yaitu jalur kelembagaan formal, jalur program pendampingan, dan jalur komunikasi informal berbasis jejaring sosial. Pada jalur kelembagaan formal, Dinas Koperasi, UKM, dan Ekonomi Kreatif berperan

sebagai regulator sekaligus fasilitator yang menjembatani kebutuhan komunitas dengan program pemerintah, sebagaimana ditegaskan oleh berikut ini.

"Kami membangun forum komunikasi rutin dengan komunitas wirausaha muda setiap bulan, di mana mereka bisa menyampaikan kendala di lapangan secara langsung. Forum ini juga menjadi ruang bagi kami untuk mensosialisasikan program bantuan, pelatihan, maupun akses pembiayaan yang tersedia. Tanpa forum semacam ini, kebijakan yang kami rancang bisa jadi tidak relevan dengan kebutuhan riil mereka di lapangan" (R.S., Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi, UKM, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Barat, wawancara, 3 Juli 2026).

Pernyataan tersebut memperkuat temuan bahwa keberhasilan kemitraan sangat bergantung pada sinergi regulasi pemerintah, dukungan infrastruktur, akses pembiayaan, serta inovasi pelaku industri kreatif, di mana pemerintah berperan menyediakan kebijakan adaptif dan fasilitatif sementara sektor lain berkontribusi dalam investasi, teknologi, dan jejaring bisnis yang lebih luas [2]. Pola interaksi semacam ini juga sejalan dengan konsep collaborative governance yang diterapkan di Kabupaten Bojonegoro, di mana pemerintah berperan menyediakan kebijakan yang adaptif sementara sektor kolaborasi lainnya berkontribusi dalam investasi, teknologi, serta jejaring bisnis yang lebih luas guna mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi [15]. Pada jalur kedua, yaitu program pendampingan, pemerintah daerah bersama komunitas wirausaha muda menyelenggarakan pelatihan tematik yang mencakup manajemen usaha, branding, dan pemasaran digital. Ketua komunitas menjelaskan bagaimana proses ini berlangsung secara partisipatif.

"Setiap program pelatihan yang diadakan pemerintah selalu melibatkan kami sejak tahap perencanaan, bukan hanya sebagai peserta. Kami diminta memberi masukan terkait materi apa yang benar-benar dibutuhkan anggota komunitas, misalnya soal pengemasan produk atau strategi pemasaran di media sosial. Pendekatan seperti ini membuat pelatihan terasa lebih tepat sasaran dan tidak sekadar formalitas" (A.F., Ketua Komunitas Wirausaha Muda Kabupaten Bandung Barat, wawancara, 11 Juli 2026).

Pendekatan partisipatif semacam ini sejalan dengan model Participatory Action Research (PAR) dan Community-Based Creative Empowerment yang diterapkan dalam pemberdayaan Forum Wirausaha Jemputan Muda (FORJUMA) di Palembang, yang menekankan partisipasi aktif mitra dalam seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi [16]. Pola pendampingan intensif dan berkelanjutan juga ditemukan dalam program penguatan kepemimpinan pemerintahan desa yang memberdayakan generasi muda melalui pelatihan manajerial, kepemimpinan partisipatif, serta keterampilan kewirausahaan berbasis potensi lokal [17]. Pada jalur ketiga, yaitu komunikasi informal berbasis jejaring sosial, interaksi antara pemerintah dan komunitas berlangsung melalui grup percakapan digital dan kegiatan informal yang mempercepat penyebaran informasi. Staf dinas menjelaskan peran teknologi digital dalam mendukung interaksi tersebut.

"Kami memanfaatkan grup WhatsApp dan media sosial resmi dinas untuk menyampaikan informasi program secara cepat kepada komunitas. Cara ini jauh lebih efektif dibandingkan surat resmi yang prosesnya panjang, apalagi anak-anak muda ini responsnya cepat kalau lewat platform digital yang mereka gunakan sehari-hari" (N.P., Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, wawancara, 15 Juli 2026).

Temuan ini memperkuat pentingnya digitalisasi sebagai instrumen penghubung antara pemerintah dan pelaku usaha muda, sebagaimana ditemukan dalam program penguatan digitalisasi UMKM yang menunjukkan peningkatan signifikan pada kompetensi peserta, di mana lebih dari separuh peserta mulai aktif menggunakan media sosial untuk promosi usaha setelah mendapatkan pendampingan digital marketing [18]. Secara keseluruhan, ketiga jalur interaksi tersebut membentuk pola kolaborasi yang bersifat multiarah, di mana pemerintah tidak lagi berperan sebagai pihak yang mendikte kebijakan

secara sepihak, melainkan sebagai mitra yang membangun kesepahaman bersama dengan komunitas wirausaha muda. Pola kolaborasi multiarah tersebut juga tampak dari peran komunitas sebagai penyalur aspirasi kolektif kepada pemerintah, bukan sekadar penerima kebijakan secara pasif.

Kondisi ini menyerupai skema kemitraan yang melibatkan sinergi regulasi pemerintah, dukungan infrastruktur, akses pembiayaan, serta inovasi pelaku industri kreatif sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling menopang [2]. Selain jalur formal dan digital, ditemukan pula pola interaksi berbasis kegiatan lapangan langsung, seperti kunjungan kerja dinas ke sentra usaha kreatif, yang memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran kontekstual atas kebutuhan riil pelaku usaha. Pendekatan berbasis kunjungan lapangan dan pendampingan langsung semacam ini sejalan dengan metode pelaksanaan yang menekankan koordinasi, asesmen kebutuhan, serta pendampingan implementasi secara bertahap dan berkelanjutan [18].

Pola interaksi ini juga memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan top-down menuju pendekatan yang lebih egaliter, di mana pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang dialog, sementara komunitas berperan aktif menentukan arah kebutuhan program. Dinamika kolaborasi semacam ini konsisten dengan temuan bahwa keterlibatan komunitas sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan berbasis kreativitas dan budaya lokal [16]. Dengan demikian, ketiga jalur interaksi yang teridentifikasi bukan berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi dan membentuk siklus komunikasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan komunitas wirausaha muda di Kabupaten Bandung Barat.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi

Hasil wawancara dan observasi lapangan mengidentifikasi beberapa faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kolaborasi. Faktor pertama adalah komitmen kepemimpinan daerah yang mendorong keberlanjutan program, sebagaimana disampaikan oleh akademisi pendamping program berikut ini.

"Faktor kunci yang saya lihat selama mendampingi program ini adalah adanya dukungan konsisten dari kepala dinas terkait. Ketika pimpinan daerah menunjukkan komitmen nyata, misalnya dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan kewirausahaan muda, maka program menjadi lebih mudah berjalan dan komunitas pun merasa lebih dihargai keberadaannya" (Y.K., Akademisi Pendamping Program Kewirausahaan Kabupaten Bandung Barat, wawancara, 7 Juli 2026).

Dukungan kepemimpinan yang konsisten ini sejalan dengan temuan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan aparatur pemerintahan turut menentukan efektivitas program pemberdayaan generasi muda dalam bidang kewirausahaan, di mana peningkatan kemampuan manajerial dan kepemimpinan partisipatif aparatur berdampak langsung pada optimalisasi pelayanan publik dan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat [17]. Faktor pendukung kedua adalah ketersediaan infrastruktur digital dan akses teknologi yang memudahkan pelaku usaha muda dalam memasarkan produknya.

Akses terhadap teknologi, pengembangan bakat, dan peraturan yang mendukung menjadi pendorong utama dalam meningkatkan daya saing wirausaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif [19]. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang signifikan. Hambatan pertama adalah birokrasi yang masih berbelit dalam proses pengurusan izin usaha dan pencairan bantuan. Pelaku usaha kreatif menyampaikan pengalamannya terkait hal ini.

"Sejujurnya proses administrasi masih menjadi kendala utama bagi kami. Kadang kami harus mengurus berkas ke beberapa instansi berbeda hanya untuk mendapatkan satu jenis bantuan, dan waktu tunggu bisa berbulan-bulan. Padahal usaha kreatif itu bergerak cepat, tren bisa berubah dalam hitungan minggu, jadi kalau birokrasinya lambat, peluang pasar bisa keburu hilang" (M.D., Anggota Komunitas Wirausaha Muda sekaligus Pelaku Usaha Kreatif, wawancara, 20 Juli 2026).

Kendala birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi lintas sektor ini konsisten dengan temuan bahwa tantangan utama dalam kemitraan pemerintah dan swasta mencakup birokrasi kompleks, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta kesenjangan akses sumber daya, sehingga diperlukan pendekatan kolaboratif berbasis kepentingan bersama dan transparansi untuk mengatasinya [2], [15]. Hambatan kedua adalah rendahnya literasi digital pada sebagian anggota komunitas wirausaha muda di wilayah pinggiran kabupaten, yang menyebabkan kesenjangan partisipasi dalam program berbasis teknologi. Kondisi semacam ini juga ditemukan pada pengembangan ekonomi kreatif di pasar tradisional, yang masih menghadapi kendala serius berupa rendahnya pemanfaatan teknologi digital, minimnya partisipasi generasi muda, dan belum optimalnya kolaborasi lintas sektor [20].

Hambatan ketiga berkaitan dengan keterbatasan akses pembiayaan dan sertifikasi bagi produk-produk kreatif yang ingin naik kelas ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar bersertifikasi halal. Tantangan semacam ini juga teridentifikasi pada produk industri berskala besar sekalipun, di mana ketergantungan pada bahan baku impor, terbatasnya jumlah lembaga sertifikasi halal, serta persaingan dengan produk halal global menjadi kendala yang harus diatasi melalui dukungan pemerintah berupa percepatan proses sertifikasi dan penguatan infrastruktur halal [21]. Bagi pelaku usaha kreatif skala mikro di Bandung Barat, tantangan tersebut menjadi lebih berat karena keterbatasan modal dan pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi.

Selain faktor-faktor tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan generasi muda itu sendiri dalam struktur kelembagaan komunitas. Rendahnya regenerasi kepengurusan komunitas di beberapa wilayah menjadi hambatan tersembunyi yang belum banyak disoroti, karena program pendampingan cenderung berhenti ketika tokoh penggerak komunitas beralih fokus pada urusan pribadi. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa rendahnya kapasitas kepemimpinan serta minimnya pemberdayaan generasi muda dalam bidang kewirausahaan berdampak pada belum optimalnya inovasi dan tingginya potensi stagnasi program di tingkat lokal [17]. Faktor pendukung lain yang teridentifikasi adalah keberadaan mentor atau pendamping eksternal yang berperan menjaga konsistensi arah program di tengah pergantian kepengurusan komunitas, sebagaimana peran akademisi pendamping yang turut memastikan keberlanjutan transfer pengetahuan antar anggota.

Sementara itu, dari sisi penghambat, keterbatasan anggaran daerah yang harus dibagi ke berbagai sektor turut memengaruhi skala dan frekuensi program pelatihan yang dapat diselenggarakan. Hambatan pembiayaan semacam ini juga tercermin dalam studi kemitraan ekonomi kreatif lainnya, di mana kesenjangan akses sumber daya menjadi salah satu tantangan struktural utama yang menghambat optimalisasi kemitraan berbasis kepentingan bersama [15]. Kombinasi antara faktor kepemimpinan komunitas, dukungan pendampingan eksternal, dan keterbatasan anggaran ini pada akhirnya membentuk dinamika yang saling memengaruhi keberlanjutan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas wirausaha muda.

3.3 Dampak Kolaborasi terhadap Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola interaksi kolaboratif yang terbangun antara pemerintah daerah dan komunitas wirausaha muda memberikan dampak positif terhadap penguatan ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung Barat, baik pada aspek peningkatan kapasitas individu, penguatan identitas kolektif, maupun perluasan jejaring pemasaran. Pada aspek peningkatan kapasitas individu, ketua komunitas menyampaikan bahwa program pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan telah mengubah cara anggota komunitas mengelola usahanya.

"Setelah mengikuti serangkaian pelatihan, banyak anggota komunitas yang tadinya hanya berjualan tanpa perencanaan matang, sekarang mulai membuat pembukuan sederhana dan strategi promosi yang lebih terarah. Bahkan beberapa dari mereka sudah berani membuat katalog produk digital sendiri untuk dipasarkan secara daring" (A.F., Ketua Komunitas Wirausaha Muda Kabupaten Bandung Barat, wawancara, 22 Juli 2026).

Perubahan pola pikir dan peningkatan kompetensi semacam ini konsisten dengan hasil program penguatan digitalisasi UMKM berbasis ekonomi kreatif, yang menunjukkan kenaikan nilai kompetensi peserta secara signifikan disertai perubahan pola pikir terhadap pentingnya transformasi digital dan pemasaran berbasis teknologi [18]. Selain itu, peningkatan kapasitas ini juga sejalan dengan temuan bahwa integrasi antara penguatan kapasitas kreatif, pelestarian budaya lokal, dan praktik keberlanjutan lingkungan dapat memperkuat daya saing ekonomi kreatif berbasis komunitas [16]. Pada aspek penguatan identitas kolektif, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas turut mendorong terbentuknya identitas bersama yang memperkuat posisi tawar pelaku usaha kreatif muda di pasar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan berikut ini.

"Yang menarik dari kolaborasi ini adalah munculnya semacam identitas kolektif di kalangan komunitas, mereka mulai bangga menyebut diri sebagai bagian dari ekosistem kreatif Bandung Barat. Identitas ini penting karena memudahkan mereka membangun kepercayaan konsumen sekaligus menarik perhatian mitra bisnis yang lebih besar" (Y.K., Akademisi Pendamping Program Kewirausahaan Kabupaten Bandung Barat, wawancara, 9 Juli 2026).

Pembentukan identitas merek kolektif semacam ini sejalan dengan temuan pada program eco jumputan di Palembang, yang berhasil membentuk identitas merek kolektif "FORJUMA Eco Jumputan Palembang" sebagai bagian dari penguatan kelembagaan kelompok perajin dan daya saing ekonomi kreatif berbasis komunitas [16]. Penguatan identitas lokal melalui inovasi produk juga ditemukan pada revitalisasi pasar tradisional, yang menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif berkontribusi pada penguatan identitas lokal melalui inovasi produk kuliner, fesyen, dan kerajinan daur ulang [20]. Pada aspek perluasan jejaring pemasaran, kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas wirausaha muda turut membuka akses pasar yang lebih luas melalui pameran, expo, serta kemitraan dengan pelaku usaha besar. Perwakilan dinas menjelaskan strategi pemerintah dalam memperluas jejaring tersebut.

"Kami secara rutin mengikutsertakan komunitas wirausaha muda dalam pameran produk kreatif tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu, kami juga menjembatani mereka dengan pelaku usaha besar melalui skema kemitraan pemasaran, sehingga produk-produk lokal bisa masuk ke jaringan distribusi yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada pasar lokal semata" (R.S., Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi, UKM, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Barat, wawancara, 17 Juli 2026).

Strategi perluasan jejaring pemasaran melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan ini sejalan dengan temuan bahwa program pemberdayaan komunitas kreatif berbasis budaya berkelanjutan turut membuka peluang keberlanjutan usaha melalui pengembangan jejaring pemasaran dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan [16]. Dampak positif kolaborasi terhadap daya saing daerah juga sejalan dengan hasil kajian mengenai penguatan ekonomi kreatif di sektor pariwisata, yang menyimpulkan bahwa ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif dapat diperkuat melalui kombinasi kreativitas, teknologi, dan praktik bisnis yang fleksibel, sehingga ekonomi lokal dapat memperoleh manfaat yang lebih besar [19].

Meskipun demikian, dampak kolaborasi tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sebagian komunitas di wilayah yang lebih terpencil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap program pendampingan, sebagaimana pola serupa yang juga ditemukan pada pengembangan ekonomi kreatif di pasar tradisional yang bersifat inkremental dan memerlukan penguatan kebijakan yang lebih terintegrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan [20]. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah-komunitas bersifat progresif namun belum sepenuhnya inklusif, sehingga masih memerlukan perluasan jangkauan program ke wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau.

Dampak lain yang teridentifikasi dari kolaborasi ini adalah tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya keberlanjutan usaha berbasis nilai tambah lokal, bukan sekadar produksi massal tanpa diferensiasi. Pelaku usaha muda di Bandung Barat mulai mengarahkan produknya pada segmen pasar yang lebih spesifik, seperti produk berbasis potensi lokal yang mengedepankan keunikan budaya

maupun bahan baku daerah. Orientasi semacam ini sejalan dengan temuan bahwa penguatan ekonomi kreatif berbasis produk halal turut didorong oleh inovasi dan digitalisasi sebagai faktor kunci dalam memperkuat daya saing produk di pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional [21].

Selain itu, kolaborasi ini turut mendorong terbentuknya kesadaran keberlanjutan lingkungan di kalangan pelaku usaha muda, tercermin dari mulai bermunculannya produk kreatif berbahan daur ulang serta praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Kecenderungan ini memperkuat temuan bahwa integrasi antara kreativitas, pelestarian budaya, dan praktik keberlanjutan lingkungan mampu memperkuat daya saing ekonomi kreatif berbasis komunitas secara jangka panjang [16]. Dampak kolaborasi juga tercermin pada meningkatnya kepercayaan diri komunitas dalam menjalin kemitraan dengan pelaku usaha berskala lebih besar, sebuah perubahan orientasi yang mencerminkan penguatan posisi tawar ekonomi kreatif berbasis komunitas di tingkat kabupaten.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pola interaksi kolaboratif antara pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan komunitas wirausaha muda telah berkontribusi signifikan terhadap penguatan ekosistem ekonomi kreatif, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural berupa birokrasi, kesenjangan literasi digital, dan keterbatasan pemerataan program. Keberhasilan kolaborasi ini pada akhirnya sangat ditentukan oleh konsistensi komitmen kepemimpinan daerah, keterlibatan aktif komunitas dalam setiap tahapan program, serta kemampuan kedua belah pihak untuk beradaptasi terhadap dinamika pasar dan teknologi yang terus berkembang.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola interaksi kolaboratif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan komunitas wirausaha muda terbangun melalui tiga jalur utama, yaitu jalur kelembagaan formal, jalur program pendampingan partisipatif, dan jalur komunikasi informal berbasis teknologi digital, yang secara bersama-sama membentuk siklus kolaborasi multiarah dan berkelanjutan. Keberhasilan kolaborasi tersebut ditopang oleh sejumlah faktor pendukung, seperti komitmen kepemimpinan daerah, ketersediaan infrastruktur digital, serta keterlibatan aktif komunitas dalam perencanaan program, meskipun masih dihadapkan pada faktor penghambat berupa birokrasi yang kompleks, kesenjangan literasi digital, keterbatasan regenerasi kepemimpinan komunitas, serta keterbatasan anggaran daerah. Dampak dari kolaborasi ini tercermin pada peningkatan kapasitas individu pelaku usaha, penguatan identitas kolektif komunitas, perluasan jejaring pemasaran, serta tumbuhnya kesadaran keberlanjutan berbasis nilai lokal, meskipun manfaatnya belum sepenuhnya merata ke seluruh wilayah kabupaten.

Implikasi teoretis dari temuan ini memperkaya pemahaman mengenai model collaborative governance dalam konteks ekonomi kreatif berbasis komunitas muda, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak semata bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada dinamika sosial dan kepercayaan antaraktor. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan daerah yang lebih inklusif dan adaptif. Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah menyederhanakan prosedur birokrasi, memperluas jangkauan program ke wilayah terpencil, serta memperkuat regenerasi kepemimpinan komunitas melalui pendampingan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kolaborasi secara lebih terukur dan representatif.

REFERENSI

- [1] S. P. Agustina, V. D. Endri, R. T. Saputri, and F. Zora, "Strategi Pengembangan UMKM di Sektor Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing," *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 5, no. 3, pp. 5123–5135, 2025, doi: 10.31004/innovative.v5i3.19286.
- [2] Rahmawati, N. Fajri, and R. Fatticia, "Analisis strategi kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif," in *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, vol. 4, pp. 422–431, 2025, doi: 10.36441/snpk.vol4.2025.358.

- [3] N. Handini, M. Darwina, Yudistira, and W. Pangestoeti, “Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan,” *Jurnal Ilmiah Nusantara*, vol. 2, no. 5, pp. 964–986, 2025, doi: 10.61722/jinu.v2i5.5793.
- [4] A. Ardhiyansyah, N. W. Sulistyowati, N. Hidayati, and E. Handayani, “Inovasi berkelanjutan: Pendekatan kolaboratif untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi di Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Pengabdian West Science*, vol. 2, no. 6, pp. 460–467, 2023, doi: 10.58812/jpws.v2i6.451.
- [5] M. Nur, “Strategi Pengembangan Kewirausahaan Sosial Berbasis E-Commerce untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, vol. 2, no. 3, 2026. [Online]. Available: <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1064>.
- [6] D. P. Nguru and M. F. Killa, “Analisis peran kemitraan antar wirausaha migran dan lokal dalam meningkatkan kinerja usaha,” *Jurnal Transformatif Unkriswina Sumba*, vol. 12, no. 2, pp. 96–107, 2023, doi: 10.58300/transformatif.v12i2.721.
- [7] E. Stawicka, “The Impact of Innovation on the Sustainable Development of Enterprises,” *Folia Oeconomica Stetinensia*, vol. 23, no. 2, pp. 370–386, 2023, doi: 10.2478/fole-2023-0036.
- [8] A. Ariesmansyah and D. Melati, “Collaborative Governance in Enforcement Program for Restrictions on Community Activities in Bandung City,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, vol. 11, no. 2, pp. 290–300, 2021, doi: 10.26858/jiap.v11i2.22531.
- [9] A. H. Muallim, Juharni, and M. R. Suaib, “Colaborative Governance Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengembagan Pariwisata Kabupaten Sinjai,” *Paradigma Journal of Administration*, vol. 2, no. 2, pp. 83–88, 2024, doi: 10.35965/pja.v2i2.5159.
- [10] A. N. Barsei, “Faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi inovasi sektor publik di Kota Padang Panjang,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, vol. 10, no. 2, pp. 42–58, 2022, doi: 10.31629/juan.v10i02.5166.
- [11] D. Chusumastuti et al., *Konsep Ekonomi Kreatif*. Solok, Indonesia: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024. [Online]. Available: <https://repository.um.ac.id/5556/>.
- [12] M. E. Rusmini, A. L. Masfiah, M. T. Rohman, P. A. Amanda, and S. F. Zahro, “Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Society 5.0 bagi Generasi Milenial,” *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, vol. 1, no. 1, pp. 26–34, 2022, doi: 10.59107/ri.v1i1.21.
- [13] A. Mulyana et al., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: CV Widina Media Utama, 2024. [Online]. Available: <https://repository.penerbitwidina.com/publications/588188/metode-penelitian-kualitatif>.
- [14] S. H. Sahir, *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=PinKEAAQBAJ>.
- [15] F. Stevani, N. Widoretno, and F. Irawan, “Collaborative Governance Sebagai Upaya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 4, no. 3, pp. 14531–14538, 2025, doi: 10.31004/jerkin.v4i3.4525.
- [16] A. W. Viatra et al., “Pemberdayaan Komunitas Forum Wirausaha Jumputan Muda (FORJUMA) melalui Inovasi Eco Jumputan untuk Mendorong Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Berkelanjutan,” *Jurnal Abdimas Mandiri*, vol. 9, no. 3, pp. 551–560, 2025, doi: 10.36982/jam.v9i3.6230.
- [17] P. M. Sari, Hendra, M. Ikbali, and Nastia, “Penguatan Kepemimpinan Pemerintahan dan Pemberdayaan Generasi Muda melalui Pendampingan Wirausaha Masyarakat,” in *Prosiding the 13th Seminar Nasional ADPI Mengabdikan untuk Negeri*, vol. 7, no. 1, pp. 30–36, 2026, doi: 10.47841/semnasadpi.v7i1.253.
- [18] M. Rasyidin, J. D. Indriani, Fettyana, H. Mubarak, and N. Sridewi, “Penguatan Digitalisasi UMKM melalui Implementasi Sistem Informasi dan Pendampingan Digital Marketing Berbasis Ekonomi

- Kreatif,” *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, vol. 5, no. 1, pp. 109–122, 2026, doi: 10.62712/juribmas.v5i1.1001.
- [19] D. Rakhilia, S. Zulia, S. U. Salsabila, and Mukhtasar, “Strategi Pengembangan Daya Saing Wirausaha Pada Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Melalui Pendekatan Inovasi, Digitalisasi, Serta Kolaborasi Antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Dan Komunitas,” in *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, vol. 4, pp. 439–444, 2025, doi: 10.36441/snpk.vol4.2025.360.
- [20] Y. F. Yoga and M. Maksin, “Implementasi Kebijakan Publik Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Pasar Tradisional Muneng Kabupaten Probolinggo,” *Jurnal Katarsis*, vol. 3, no. 2, pp. 62–74, 2026, doi: 10.62734/kts.v3i2.960.
- [21] A. Amiza and D. Stiawan, “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Produk Halal: Studi Produk Air Minuman dalam Kemasan AQUA,” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 150–159, 2025.